

**PERAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA
PEMERINTAH KOTA BINJAI**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam
Sumatera Utara*

Oleh :

Happy Andi Wisata Bangun
NPM : 71220123025

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara



MAGISTER ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

**PERAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA
PEMERINTAH KOTA BINJAI**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam
Sumatera Utara*

Oleh :

Happy Andi Wisata Bangun
NPM : 71220123025

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Medan, 17 Januari 2024

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Marzuki, S.H.,M.Hum.

Dr. Ibnu Affan, S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain memanjatkan untaian puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya yang senantiasa berlimpah kepada penulis, sehingga penulis diberikan kemampuan, kekuatan serta ketabahan hati dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang senantiasa membawa cahaya rahmat bagi seluruh sekalian alam. Dengan rahmat Allah Swt dan ikhtiyar semaksimal mungkin, penulis berusaha untuk menyajikan skripsi berjudul: **“PERAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA BINJAI”**. Tesis ini dimaksudkan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Penulis hanya dapat mendo'akan, semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan berkahnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya selama ini. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Yaa rabbal'amin
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 17 Januari 2024

Happy Andi Wisata Bangun

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	II
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	7
1. Kerangka Teori	7
2. Kerangka Konsep	22
F. Asumsi (Anggapan Dasar).....	24
G. Keaslian Penelitian	25
H. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Metode Pendekatan	28
3. Alat Pengumpulan Data	28
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	28
5. Analisis Data	29
6. Jadwal Penelitian	30
BAB I : PENGATURAN HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KOTA BINJAI	32

A.	Gambaran Umum tentang Pemerintahan Daerah ..	32
B.	Pengertian Produk Hukum Daerah dan Jenisnya ...	40
C.	Pengaturan Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kota Binjai.....	51
1.	Dasar Hukum Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Binjai	51
2.	Pengaturan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah di Pemerintahan Kota Binjai ...	53
BAB III	: PERAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI KOTA BINJAI	72
A.	Organisasi Perangkat Daerah	72
B.	Pengawasan Produk Hukum Daerah	77
C.	Gambaran Umum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai	80
D.	Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah	91
BAB IV	: HAMBATAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAHAN KOTA BINJAI DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BINJAI DAN SOLUSINYA..	98
A.	Faktor Yang Menghambat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah	98
B.	Solusi.....	100
BAB V	: KESIPULAN DAN SARAN.....	103
A.	Kesimpulan	103
B.	Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, LPPM Universitas Bandung, Bandung, 1995

Djojuroto Kinayati dan M.L.A Sumayati. *Penelitian, Analisis dan Pedoman Apresiasi*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2014

Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Cet. I, Jakarta, 2007

Hendry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, United State of American, 1998

Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006

John M.Echolls dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, 2000

J.L. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya. Bandung, 2010

Mahendra Putra Kurnia, et all, *Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif*, Kreasi Total Media, Jogjakarta, 2007

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 2019

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018

Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007

Sirajuddin, dkk, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Malang Corruption Watch dengan Yappika, Malang, 2006

Sulchan Syahid, *Kamus Besar Bahasa Indonsia*, Jakarta, 2000

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018

Supardan Modeong dan Zudan Arif Fakrulloh, *Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris*, PT.Perca, Jakarta, 2005

S. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi. Revisi). Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

Torang Syamsir, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung, 2014

Umar Dzulkifli dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum Dictionary Of Law New Edition*, Mahirsindo Utama, Jakarta, 2014

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah

Peraturan Walikota Binjai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Binjai

C. Jurnal/Artikel/Tesis

Anis Ibrahim, *Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah di Jawa Timur*, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2008

A.Hamid. S.Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Doktor UI, Jakarta: 1990

Marzuki. *Pertanggung jawaban Hukum BAPPEDA Kota Binjai Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Untuk Mewujudkan Good (Tinjauan Peraturan Walikota Binjai Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai*. Jurnal Ilmiah METADATA, Vol 3, No.3,

Mia Kusuma Fitriana, *Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws and Regulations in Indonesia As the Means of Realizing the Country ' S Goal)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12, No. 02, 2015

Risky Dian Novita Rahayu Rochim, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang- Undangan tentang Kebebasan Hakimll*, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya, Malang, 2014

Sunarno Danusastro, *Penyusunan Program Legislasi Daerah Yang Partisipatif*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 4, 2012

Yuli Asmara, *Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan PerundangUndangan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesiall*, Jurnal Lex Librum, Vol.III, No.1, 2016

D. Internet

<https://www.pojokwacana.com/sentralisasidesentralisasi-dan-partisipasi-masyarakat/>